

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT KARENA WANPRESTASI MELALUI SUBROGASI (Studi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Kediri)

Astika Rahma Yustisia<sup>1</sup>, Iwan Permadi<sup>2</sup>, Itta Andrijani<sup>3</sup>

Program Studi Magister Kenotariatan  
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang  
Jl. MT.Haryono169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0641) 566505  
Email: astikayustisia@yahoo.com

## Abstract

*Bank as creditor should be aware of the risks that will arise over the lending process in the event of default by the debtor. The purpose of this article is to analyze the law of legal protection for banks in the completion of KUR as defaults through subrogation and to describe the system in the completion subrograsi KUR and Credit Laguna because of defaults by debtors at Bank Jatim Branch of Kediri. This law article uses empirical methods of writing laws and using socio-juridical approach. Results of this paper is the protection for creditors who are disadvantaged as a result of default by the debtor by providing power as measured in accordance with laws and regulations. The authority is to determine the contents of the MOU will be valid as legislation for Banks and Institutions underwriting. In the MOU between PT. Bank Jatim Branch of Kediri with PT.Jamkrida and PT.Jamkrindo explained that the creditor has the right to claim credit and rescue efforts as legal protection for banks in settlement of loans through subrogation. Subrogation begins when the event of default of the debtor recipient credit facilities guaranteed by the Guarantee Institution. Bank will submit a claim to the Insurance Agency which cover credit facilities and Laguna KUR type with requirements specified in the agreement between the Secured Party and the guarantee institution. When it happens the first payment by the debtor since the claim is paid by the Guarantee Institution, then when it happens Subrogation. Payments made by the debtor will be paid or returned to the party through a bank guarantee. As a result of subrogation of the obligation of the debtor installment is fixed debtor is obliged to return the remainder of the loan which has been approved in the Credit Agreement. Subrogation rights may be lost due to the terms agreed upon can not be met entirely.*

**Key words:** *legal protection, credit settlement, breach of contract, subrogation*

## Abstrak

Bank sebagai kreditur harus menyadari atas resiko yang akan timbul atas proses penyaluran kredit bila terjadi wanprestasi oleh debitur. Tujuan tulisan hukum ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi bank dalam penyelesaian KUR karena wanprestasi melalui subrogasi dan untuk mendeskripsikan sistem subrograsi dalam penyelesaian KUR dan Kredit Laguna karena wanprestasi oleh debitur pada Bank Jatim Cabang Kediri. Tulisan hukum ini menggunakan metode tulisan hukum empiris dan menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil tulisan ini adalah Perlindungan bagi kreditur yang

dirugikan akibat wanprestasi oleh debitur dengan cara memberikan kekuasaan secara terukur sesuai dengan peraturan perundangan. Kekuasaan tersebut adalah dengan menentukan isi MOU yang akan berlaku sebagai Undang-undang bagi Bank dan Lembaga penjaminan. Dalam MOU antara PT. Bank Jatim Cabang Kediri dengan PT.Jamkrida dan PT.Jamkrindo menjelaskan bahwa kreditur memiliki hak klaim dan upaya penyelamatan kredit sebagai perlindungan hukum bagi bank dalam penyelesaian kredit melalui subrogasi. Subrogasi dimulai ketika terjadi wanprestasi dari debitur penerima fasilitas kredit yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan. Bank akan mengajukan klaim kepada Lembaga Penjaminan yang mengcover fasilitas kredit type KUR dan Laguna tersebut dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama antara Pihak Terjamin dan lembaga penjaminan. Ketika terjadi pembayaran pertama oleh debitur sejak klaim dibayarkan oleh Lembaga Penjaminan, maka saat itu terjadi Subrogasi. Pembayaran yang dilakukan oleh debitur akan dibayarkan atau dikembalikan kepada pihak penjaminan melalui bank. Akibat subrogasi atas kewajiban debitur mengangsur adalah debitur tetap wajib mengembalikan sisa pinjaman yang telah disetujui dalam Perjanjian Kredit. Hak subrogasi dapat hilang dikarenakan syarat yang telah disepakati tidak dapat terpenuhi seluruhnya.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, penyelesaian kredit, wanprestasi, subrogasi

## **Latar Belakang**

Bank merupakan badan usaha yang melakukan aktivitas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat<sup>1</sup>. Dari pengertian yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan usaha perbankan meliputi :<sup>2</sup>

1. Menghimpun Dana;
2. Menyalurkan Dana;
3. Memberikan Jasa Bank lainnya.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 11 Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan Kredit merupakan kegiatan penyediaan tagihan atau uang yang dilakukan berdasarkan kesepakatan tentang pinjam meminjam dalam jangka waktu tertentu antara pihak Kreditur atau pihak yang meminjamkan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pemimjam atau debitur untuk melunasi hutangnya dengan pemberian bunga.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang **Perbankan**.

<sup>2</sup> Kasmir, **Manajemen Perbankan**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13.

Dalam proses pemberian kredit, bank harus menganut prinsip kehati-hatian dan harus berdasarkan prinsip ekonomi sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Selanjutnya penerapan prinsip kehati-hatian yang dimaksudkan dalam Pasal 2 diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bahwa prinsip kehati-hatian tersebut diterapkan melalui proses analisis dari pihak Bank dan berdasarkan itikat baik dari pihak Debitur bahwa debitur memiliki kemauan dan kesanggupan untuk membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian. Bank Umum dalam menerapkan kegiatan pengkreditan harus berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia.<sup>3</sup>

Bank wajib memenuhi cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya dalam melakukan kegiatan usahanya memberikan kredit atau pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya.<sup>4</sup>

Bank sebagai pemberi kredit (Kreditur) harus menyadari atas resiko yang akan timbul dikemudian hari atas proses penyaluran kredit. Resiko yang terjadi antara lain bila terjadi wanprestasi oleh penerima kredit (Debitur). Wanprestasi yang dimaksudkan adalah apabila seorang nasabah kredit (debitur) yang dinilai layak menerima kredit atau pembiayaan dalam bentuk lain tidak dapat menyelesaikan pembayaran atau tidak dapat mengangsur dikarenakan debitur sudah tidak mampu mengangsur maupun karena debitur telah meninggal sebelum kredit lunas atau jatuh tempo.

Contoh kasus terjadi pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Tbk. Cabang Kediri atau disingkat PT Bank Jatim Tbk. Cabang Kediri, dimana dalam proses pemberian kredit meskipun telah dilakukan analisa mendalam, namun masih terdapat keadaan wanprestasi oleh debitur. Wanprestasi yang dimaksud adalah dimana debitur telah menunggak angsuran karena debitur sudah tidak mampu atau tidak mau membayar angsuran. Hal tersebut dapat merugikan Bank dimana dapat meningkatkan kolektibilitas kredit yang bersangkutan. Kolektibilitas akan mempengaruhi *non performing loan* (NPL) dan apabila tidak dilakukan *action step* oleh bank akan mengganggu kesehatan bank.

---

<sup>3</sup> Pasal 8 ayat 2 Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang **Perbankan**.

<sup>4</sup> Pasal 29 Ayat 3 Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang **Perbankan**.

Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP.01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Tbk. Cabang Kediri atau disingkat PT Bank Jatim Tbk. Cabang Kediri adalah salah satu Bank yang ditunjuk sebagai Bank pelaksana KUR.

Perjanjian Subrogasi yang dilakukan di PT Bank Jatim Tbk. Cabang Kediri dilaksanakan melalui proses *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara Bank dengan pihak penjaminan yang selama ini adalah BUMN antara lain PT Jamkrindo dan PT.Jamkrida. Perusahaan Umum (PERUM) Sarana Peengembang Usaha diubah namanya menjadi PT Jaminan Kredit Indonesia (jamkrindo) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.41 tanggal 19 Mei 2008, melakukan perjanjian kerjasama (MOU) dengan PT BPD Jatim,Tbk sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum (PERUM) Sarana Pengembang Usaha dengan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur tentang Penjaminan Kredit Umum. Pemberian Kredit dengan perjanjian Subrogasi ini diberikan untuk mengcover pinjaman yang diberikan oleh pemerintah khususnya, contohnya pada type Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Laguna di PT Bank Jatim Tbk. Cabang Kediri. Hal itu menunjukkan bahwa PT Bank Jatim Tbk. Cabang Kediri melaksanakan proses subrogasi sebagai salah satu upaya penyelamatan kredit saat terjadi wanprestasi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Karena Wanprestasi Melalui Subrogasi pada PT. BPD Jatim Tbk. Cabang Kediri?
2. Bagaimana Sistem Subrograsi Dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Laguna karena wanprestasi oleh Debitur pada PT. BPD Jatim Tbk. Cabang Kediri?

Tulisan hukum ini menggunakan metode tulisan hukum empiris dan menggunakan metode pendekatan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis adalah metode pendekatan yang digunakan untuk menganalisa berbagai teori-teori hukum dan perUndang-undangan terkait dengan tinjauan hukum atas subrogasi kredit bagi debitur wanprestasi yang dihubungkan dengan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor :

KEP.01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pendekatan sosiologis, digunakan untuk menganalisa hukum bukan hanya sebagai perangkat peraturan perundangan yang bersifat normatif tetapi hukum dilihat sebagai kebiasaan masyarakat. Tulisan ini menggunakan beberapa bahan hukum yang digunakan untuk sumber tulisan yaitu Data primer diperoleh peneliti langsung dari lokasi tulisan yaitu pada PT BPD Jawa Timur, Tbk Cabang Kediri dengan melakukan wawancara langsung kepada para responden dan Data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung yaitu melalui literatur, penelusuran data melalui internet, kliping koran, serta penelusuran dari peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Teknik analisis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode *deskriptif kualitatif* artinya penulis menggunakan metode ini untuk mengungkapkan data yang ada dan hasil wawancara kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori dan asas-asas yang berlaku sehingga ditemukan pemecahannya. Setelah dianalisis maka akan ditemukan kesimpulan secara umum kemudian akan ditemukan kesimpulan atas jawaban atau solusi konkrit atas permasalahan hukum yang dikaji.

## **Pembahasan**

### **A. Gambaran Kasus**

Dalam gambaran kasus penulis akan menjelaskan kasus mengenai Penyelesaian Kredit karena wanprestasi oleh Debitur yang terjadi di PT. BPD Jatim Tbk Cabang Kediri. Wanprestasi yang dimaksud karena debitur meninggal dunia, sehingga tidak dapat menyelesaikan pembayaran angsuran kredit.

A seorang pengusaha, mendapatkan fasilitas pinjaman Kredit Usaha guna mengembangkan usahanya. A memiliki usaha perdagangan sembako dan telah menjalankan usaha selama 3 tahun terakhir. Usaha dijalankan A bersama dengan Istrinya. Bank memberikan fasilitas pinjaman atau kredit sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama 3 tahun dengan angsuran bulanan disepakati dan diperjanjikan secara Notariil. Selanjutnya kredit diberikan kepada A karena A telah memenuhi persyaratan administrasi, memenuhi prinsip 5C, dan SID dinilai bagus. Bank menyetujui pemberian Kredit dengan pertimbangan bahwa A ingin mengembangkan usaha perdagangan

sembako yang dimilikinya. Penggunaan Prinsip 5C dilakukan sehingga risiko kredit dapat diprediksi sejak awal pemberian kredit. Kredit yang diberikan harus sesuai kebutuhan debitur dan diyakini bahwa kredit dapat dikembalikan oleh debitur pada waktu dan jumlah yang diharapkan oleh bank atau disebut dengan *repayment capacity*. Angsuran A berjalan lancar selama 10 bulan pertama, namun terjadi terlambat bayar atas pinjaman A pada bulan kesebelas. Setelah dilakukan kunjungan *on the spot* nasabah, diketahui bahwa nasabah telah meninggal dunia dikarenakan sakit. Ahli waris A belum memberitahukan kepada pihak Bank bahwa A telah meninggal dunia dikarenakan masih dalam keadaan berduka.

PT. BPD Jatim Tbk Cabang Kediri melakukan Perjanjian Kerjasama atau MOU dengan Lembaga Penjaminan guna menjamin pinjaman yang diberikan dalam skim Kredit KUR dan Laguna. Perjanjian kerjasama tersebut tertuang dalam MOU antara PT. BPD Jatim Tbk Cabang Kediri dengan PT Jamkrindo dan PT. BPD Jatim Tbk Cabang Kediri dengan PT. Jamkrida<sup>5</sup>. Perjanjian kerjasama yang dilakukan adalah PT. BPD Jatim Tbk Cabang Kediri sebagai pihak Kreditur mengajukan Penjaminan atas skim Kredit KUR dan Laguna kepada pihak penjaminan pada saat terjadi perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang. Pengajuan penjaminan kredit dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disepakati para pihak yaitu Bank dan Lembaga Penjaminan. Ketika pengajuan penjaminan kredit telah memenuhi segala syarat-syarat yang telah disepakati maka pihak Lembaga Penjaminan akan mengeluarkan Sertifikat Penjaminan atau Polis yang digunakan sebagai bukti bahwa kredit telah mendapatkan Penjaminan.

Dalam Sertifikat Penjaminan KUR disebutkan bahwa pihak penjaminan, menjamin 70% dari sisa pokok ditambah dengan kewajiban bunga pada saat pengajuan klaim. Lembaga Penjaminan yang dalam hal ini adalah PT Jamkrindo tidak memberikan asuransi jiwa maupun asuransi kebakaran. Apabila terjadi kematian debitur, atas wanprestasi tersebut tidak menghilangkan kewajiban debitur untuk tetap melunasi sisa pinjaman. Ketika dilaporkan dan dilakukan upaya *on the spot* lanjutan, ahli waris mengakui dan bersedia untuk mengangsur jika memiliki uang, namun ahli waris hanya

---

<sup>5</sup> Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP.01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang **Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat**.

seorang janda dan tidak memiliki pendapatan, sedangkan usaha yang dijalankan oleh A tidak ada yang mengurus sejak A meninggal sehingga terjadi kredit macet.

Kasus kedua mengenai Penyelesaian Kredit karena wanprestasi oleh Debitur pada PT. BPD Jatim Tbk. Cabang Kediri. Wanprestasi yang dimaksud karena debitur lalai untuk membayar atau tidak dapat menyelesaikan pembayaran angsuran kredit dengan tepat waktu sehingga hal tersebut akan meningkatkan *collectibilitas* kredit yang bersangkutan.

B adalah seorang petani palawija. B mengajukan pinjaman kepada PT. BPD Jatim Tbk. Cabang Kediri pada tahun 2010 dikarenakan kekurangan modal untuk membeli bibit dan membiayai pertanian palawija. Setelah melalui proses analisis kredit, maka Debitur B mendapatkan pinjaman sebesar Rp 80.000.000,00 ( delapan puluh juta rupiah ) selama 3 tahun dimulai Tahun 2011. Namun setelah berjalan 6 bulan, terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh Debitur B. Bank sebagai kreditur dalam proses *maintenance* nasabah selalu melakukan *monitoring* terhadap perubahan *collectibilitas* nasabah. Apabila sudah muncul *collect 2* atau status Dalam Perhatian Khusus, Bank wajib menempuh cara guna mengembalikan *collectibilitas 1* atau berstatus lancar.

Upaya yang dilakukan oleh kreditur antara lain melakukan penagihan *on the spot* maupun Surat Peringatan (SP) Tunggakan Kredit kepada Debitur. Apabila telah mengirimkan Surat Peringatan (SP) Tunggakan Kredit, namun masih belum ada upaya debitur untuk mengangsur, Selanjutnya petugas Bank melakukan *on the spot* ditempat usaha Debitur. Dari hasil kunjungan, debitur mengakui belum dapat membayar angsuran dikarenakan usaha yang dijalani mengalami penurunan drastis dan hampir mengalami kebangkrutan dikarenakan bencana alam Gunung Kelud yang terjadi pada bulan Maret Tahun 2014. Diperoleh keterangan dari Debitur bahwa uang hasil realisasi kredit tidak seluruhnya digunakan untuk membiayai pertanian palawija, tapi juga digunakan untuk membeli mobil Pickup guna mengangkut hasil pertanian. Disisi lain Debitur masih memiliki keinginan untuk mengangsur, namun tidak memiliki uang sama sekali untuk mengangsur karena gagal panen akibat terkena bencana Gunung Kelud, sedangkan mobil pickup yang baru dibeli juga mengalami kerusakan sehingga harganya turun bila dijual.

Dari hasil kunjungan dapat diketahui sebab-sebab Debitur wanprestasi mulai dari *collectibilitas 2* atau status Dalam Perhatian Khusus sampai dengan *collectibilitas 5* atau

macet. Salah satu penyebab yang dapat mengganggu kesehatan Bank adalah NPL atau *non performing loan* yang tinggi juga.

Ada 2 kemungkinan kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yaitu :

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*Force Majeure*), yakni keadaan diluar kemampuan debitur.

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Adapun 4 (empat) macam keadaan seorang debitur yang dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi, yaitu<sup>6</sup>:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang wajib memenuhi prestasinya, maka kemungkinan hal ini akan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak menerima prestasi tersebut. Sebagai akibatnya, maka pihak yang karena perbuatannya atau kelalaiannya yang dapat menimbulkan kerugian tersebut kewajibannya untuk membayar ganti kerugian. Untuk mengetahui sejak saat kapan debitur itu dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian itu dipandang perlu untuk memperingatkan debitur guna memenuhi prestasinya itu.

Dari kedua kasus tersebut terdapat persamaan yaitu wanprestasi terjadi saat terdapat kelambatan pembayaran angsuran oleh Debitur. Sedangkan perbedaannya adalah keterlambatan dikarenakan debitur meninggal dunia dan Debitur telah tidak mampu mengangsur karena keadaan bangkrut maupun bencana alam. Setiap keterlambatan pembayaran angsuran akan menyebabkan penurunan *collectibilitas* kredit.

Bila dilihat dari pihak Bank sebagai kreditur akan mengalami beberapa kerugian apabila terjadi penunggakan angsuran kredit, antara lain :

1. Mempengaruhi kesehatan Bank karena penurunan *collectibilitas* kredit.

---

<sup>6</sup> Subekti, **Hukum Perjanjian Internasional**, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 45.



2. Meningkatkan NPL (*non performing loan*) Bank tersebut. PT BPD Jatim Tbk adalah Bank yang ditunjuk untuk mengelola dana pemerintah, apabila NPL telah mencapai 5%, maka Dana pemerintah harus berpindah ke Bank lain dan tidak dapat menyalurkan Kredit sampai Bank kembali dinyatakan sehat.

Bank sebagai Kreditur wajib menempuh cara-cara guna melakukan penyelamatan Kredit. Pada type pinjaman yang discover atau dijamin oleh Lembaga Penjaminan, Bank dapat mengajukan upaya untuk pembayaran Klaim oleh pihak penjamin atas kredit tersebut. Lembaga Penjaminan tidak dapat menerima klaim atas pinjaman dengan status *collectibilitas* 1 atau lancar, *collectibilitas* 2 atau Dalam Perhatian Khusus, *collectibilitas* 3 atau Kurang Lancar namun baru dapat diajukan bila telah masuk *collectibilitas* 4 atau Diragukan. Lembaga Penjaminan dapat menjamin pinjaman tapi tidak menghapuskan kewajiban Debitur untuk tetap mengangsur.

Untuk menghindari kerugian lebih besar dan bertujuan mengganti kerugian Bank yang telah terjadi, Bank melakukan subrogasi atas pinjaman yang dijamin oleh lembaga penjaminan PT Askrido. Dalam proses subrogasi ini, Bank sebagai Kreditur selayaknya mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan tegas.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Karena Wanprestasi Melalui Subrogasi pada PT. BPD Jatim Tbk. Cabang Kediri**

Dalam proses pemberian Kredit atau pinjaman, para pihak yang melakukan kesepakatan atas pemberian kredit tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum agar tercipta keadilan. Seperti halnya pemberian kredit yang diberikan oleh PT. BPD Jatim Tbk. Cabang Kediri, semua pihak yang melakukan perjanjian kredit baik dari pihak PT. BPD Jatim Tbk. Cabang Kediri sebagai kreditur maupun pihak Debitur atau nasabah kredit berhak untuk mendapatkan segala hak dan kewajibannya secara seimbang. Terciptanya perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian merupakan contoh terwujudnya kepastian hukum. Kepastian merupakan salah satu ciri dari hukum yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam hal untuk norma hukum tertulis. Salah satu dari tujuan hukum adalah kepastian.

Dalam proses pemberian kredit tersebut, Bank harus mengacu pada Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP.01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar

Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Standart Operasional yang berlaku pada Bank pelaksana. Selanjutnya pihak PT. BPD Jatim Tbk. Cabang Kediri sebagai salah satu Bank yang ditunjuk sebagai pelaksana Kredit KUR dan melakukan kerjasama yang dituangkan dalam *Memorandum Of Understanding* atau MOU dengan lembaga Penjaminan yang ditunjuk, yaitu PT.Jamkrida dan PT.Jamkrindo. Secara garis besar *Memorandum Of Understanding* atau MOU antara PT. BPD Jatim Tbk. Cabang Kediri dengan PT.Jamkrida dan PT.Jamkrindo adalah menindaklanjuti aturan pemberian kredit khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit Laguna berdasarkan KEP.01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Standart Operasional yang berlaku pada Bank pelaksana. Isi dari MOU tersebut adalah mengatur pelaksanaan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yaitu Bank sebagai pelaksana kredit dan Lembaga Penjamian sebagai pihak penjaminan. antara lain mengenai :

1. Persyaratan Kredit umum yang dapat diajukan penjaminan.
2. Tata Cara Pengajuan Penjaminan Kredit
3. Jumlah Penjaminan
4. Imbal jasa Penjaminan
5. Perpanjangan Penjaminan Kredit
6. Hak Klaim Dan Upaya Penyelamatan Kredit
7. Tata cara Pengajuan Klaim
8. Keputusan Klaim
9. Penagihan Piutang Setelah pembayaran Klaim
10. Gugurnya Hak Klaim
11. Kerugian Yang Tidak Ditanggung

Dalam *Memorandum Of Understanding* atau MOU antara PT. BPD Jatim Tbk. Cabang Kediri dengan PT.Jamkrida dan PT.Jamkrindo menjelaskan bahwa Kreditur memiliki Hak Klaim dan upaya Penyelamatan Kredit sebagai Perlindungan Hukum bagi Bank Dalam Penyelesaian kredit Melalui Subrogasi.

Mengenai Subrogasi<sup>7</sup> atau subrogation yaitu pengalihan kreditur kepada pihak lain yang telah melakukan pembayaran atas utang debitur sehingga pihak lain tersebut

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) .

menggantikan kedudukan sebagai kreditur; dengan demikian, segala hak dan kewajiban debitur beralih kepadanya. Subrogasi sendiri pengertiannya telah diatur di dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum dagang (KUHD). Subrogasi pada dasarnya merupakan pergantian hak-hak oleh seseorang kepada pihak ketiga<sup>8</sup>. Disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa terdapat pihak ketiga diluar Kreditur dan Debitur, yaitu lembaga penjaminan. Lembaga penjaminan tersebut adalah Perusahaan penjaminan/asuransi sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan dan memberikan sebagian penjaminan kredit/pembiayaan secara otomatis (*automatic cover*) kepada Bank Pelaksana<sup>9</sup>. Lembaga penjaminan yang dimaksud berbeda dengan lembaga asuransi. Hal yang mendasari perbedaan tersebut adalah objek yang *dicover* oleh Lembaga Penjaminan adalah Kredit, sedangkan objek yang *dicover* oleh asuransi biasanya adalah asuransi jiwa dan asuransi kebakaran atau asuransi bagi barang jaminan.

Lembaga penjaminan telah ditunjuk langsung oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP.01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Penunjukan PT. Jamkrida dan PT. Jamkrindo sebagai Lembaga Penjaminan bertujuan memberikan jaminan atas pinjaman KUR/Laguna yang disalurkan oleh PT. BPD Jatim Tbk. Cabang Kediri sebagai Bank Pelaksana sehingga dapat mengurangi resiko kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi. Imbal jasa Penjaminan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja negara (APBN) yang dihitung dari nilai penjaminan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Wanprestasi atas penyaluran kredit tersebut antara lain adalah ketika Debitur tidak dapat memenuhi prestasi. Hal itu dikarenakan beberapa faktor antara lain ketika debitur menunggak, karena ketidakmampuan maupun ketidakmauan debitur, ataupun karena debitur meninggal dunia sehingga tidak dapat melanjutkan angsuran. Dalam kasus yang terjadi adalah debitur di PT. BPD Jatim Tbk. Cabang Kediri wanprestasi karena debitur meninggal dunia sehingga tidak dapat melanjutkan angsuran, dan selanjutnya debitur

---

<sup>8</sup> Pasal 1400 **KUHPerdata**.

<sup>9</sup> Huruf E Angka 5 Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP.01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang **Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat**.

wanprestasi karena mengalami gagal panen akibat bencana gunung kelud yang masuk dalam kategori *force majeure* atau keadaan memaksa akibat bencana alam.

Debitur dianggap lalai ketika ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Berada dalam keadaan lalai adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi, apabila saat ini dilampauinya maka debitur dinyatakan wanprestasi<sup>10</sup>. Atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur akan mempengaruhi hak yang dimiliki kreditur. Hak yang dimaksud adalah hak kreditur untuk memperoleh pembayaran atau *repayment capacity* yang sebelumnya telah disepakati dalam perjanjian kredit. Namun kreditur juga memiliki hak-hak lain apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, yaitu :

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan.
2. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik menuntut pembatalan perikatan.
3. Hak untuk menuntut ganti kerugian.
4. Hak untuk menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.
5. Hak untuk menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Pada perjanjian antara kreditur dengan perusahaan pembiayaan dibuat dalam Sertifikat Penjaminan atau Polis Penjaminan dan tidak melibatkan Debitur karena debitur tidak diwajibkan membayar sejumlah premi. Pihak PT. BPD Jatim Tbk. Cabang Kediri mengajukan penjaminan atau pertanggungan atas pinjaman dan hal-hal berkaitan yang telah disepakati dengan pihak Penjaminan yaitu PT. Jamkrindo dan PT. Jamkrida setelah Kreditur dan Debitur menandatangani Perjanjian Kredit. Pada intinya, dalam perjanjian kredit atau utang piutang tersebut berlaku hal yang sama sebagaimana telah kami kemukakan di atas. Tidak ada istilah penghapusan utang apabila debitur meninggal. Terhadap utang, debitur maupun ahli warisnya tetap harus berusaha untuk melunasinya. Pihak penjaminan hanya memberikan jaminan atas sebagian pinjaman dan tidak berlaku 100% atas pinjaman.

Ketika seorang debitur mulai telat membayar atau menunggak angsuran, maka pihak PT. BPD Jatim Tbk. Cabang Kediri akan mengirimkan peringatan secara lisan baik melalui telepon maupun kunjungan kepada Debitur untuk kolektibilitas 2 (dua) atau

---

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bhakti, Bandung , 2001, hlm.18.

status Dalam perhatian Khusus. Apabila telah masuk kolektibilitas 3 (tiga) atau kurang lancar maka pihak Bank akan mengirimkan Surat Peringatan ( SP ) kepada debitur. Surat peringatan kepada debitur inilah yang digunakan sebagai alat bukti bahwa debitur telah wanprestasi karena di dalamnya dijelaskan mengenai jumlah tunggakan Debitur. Bank pelaksana KUR sebagai kreditur terlebih dahulu melakukan penilaian atas berbagai hal terkait dengan prinsip 5C dan prinsip kehati-hatian sebelum memberikan fasilitas pinjaman. Kreditur harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran kredit untuk menghindari resiko yang dapat merugikan bank. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan cara mengenal *character*, penilaian agunan, modal, dan kondisi ekonomi yang sedang terjadi saat ini sehingga dapat mengurangi risiko terjadi kredit macet. Namun dalam suatu perjanjian adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum, perbuatan semacam ini biasa disebut sebagai kelalaian (wanprestasi). Selain penilaian terhadap 5C tersebut, dalam pemberian kredit KUR dan LAGUNA di PT Bank Jatim,Tbk Cabang Kediri.

PT. BPD Jatim Tbk. Cabang Kediri sebagai kreditur melakukan perjanjian guna penjaminan kredit terhadap pihak ketiga yaitu lembaga penjaminan sesuai dengan KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selanjutnya dituangkan dalam *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara PT. BPD Jatim Tbk dengan lembaga Penjaminan PT Jamkrindo dan PT. Jamkrida. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya Bank guna menjaga kesehatan Bank apabila terdapat debitur wanprestasi. Wanprestasi yang dimaksud adalah apabila terdapat nasabah yang lalai sehingga tidak dapat memenuhi *prestasi* atau kewajibannya karena tidak terdapat kemampuan maupun kemauan dari debitur yang bersangkutan.

Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Laguna Karena Wanprestasi Melalui Subrogasi pada PT. BPD Jatim Tbk. Cabang Kediri terdapat dalam KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara lain adalah Guna memperluas dan meningkatkan efektifitas Pelaksanaan KUR agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bank berhak membuat Nota Kesepahaman Bersama (*memorandum Of Understanding*) beserta addendumnya dengan Lembaga Penjaminan PT

Jamkrindo dan PT Jamkrida tanpa menyimpangi Peraturan dan Standart Operasional dan Prosedur (SOP) yang berlaku. Dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah PT. BPD Jatim Tbk atas kerugian yang timbul akibat debitur wanprestasi.

Berdasarkan prinsip perlindungan pihak yang dirugikan maka apabila terjadi wanprestasi terhadap suatu perjanjian kepada pihak lainnya diberikan hak sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. Exception non adimpleti contractus

Berdasarkan prinsip exemptio non adimpleti contractus maka pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat menolak melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi selanjutnya manakala pihak lainnya melakukan wanprestasi.

2. Penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan.

Apabila pihak lawan telah melakukan wanprestasi, misalnya mulai mengirim barang yang rusak dalam suatu perjanjian jual beli maka pihak yang dirugikan berhak menolak pelaksanaan prestasi selanjutnya dari pihak lawan tersebut, misalnya menolak menerima barang selanjutnya yang akan dikirim oleh pihak lawan dalam perjanjian jual beli tersebut.

3. Menuntut restitusi

Ada kemungkinan sewaktu pihak lawan melakukan wanprestasi, pihak lainnya telah selesai atau telah mulai melakukan prestasinya seperti yang diperjanjikan, maka pihak yang melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang telah dilakukannya.

Berdasarkan contoh kasus beserta analisa kasus sebelumnya, diketahui bahwa PT. BPD Jatim Tbk. Cabang sebagai kreditur adalah pihak yang dirugikan atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. PT. BPD Jatim Tbk memperoleh perlindungan hukum dengan menuntut haknya yaitu hak untuk memperoleh Klaim atas debitur wanprestasi

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, **Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 96.

dari Pihak Penjaminan yaitu PT. Jamkrindo yang selanjutnya dibayarkan oleh Pihak Penjaminan kepada PT. BPD Jatim Tbk. Hak tersebut digunakan oleh PT. BPD Jatim Tbk guna melindungi *collectibilitas* Kreditagar tidak sampai membuat NPL yang tinggi. Namun selanjutnya PT. BPD Jatim Tbk sebagai terjamin tetap berkewajiban menagih kepada kreditur dan mengembalikan uang hasil penagihan secara proporsional kepada Pihak Penjaminan melalui proses subrogasi.

### **C. Sistem Subrograsi Dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Laguna karena wanprestasi oleh Debitur pada PT. BPD Jatim Tbk. Cabang Kediri**

Sistem subrogasi yang dilakukan oleh PT. BPD Jatim Tbk. Cabang Kediri dan lembaga penjaminan yang telah ditunjuk sesuai dengan KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara kedua belah pihak. Subrogasi dimulai ketika terjadi wanprestasi dari Debitur penerima fasilitas Kredit yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan. Subrogasi terjadi karena terdapat penagihan atas kredit macet atau kredit hapus buku (*write-off*) karena debitur wanprestasi.

Penghapusbukuan merupakan salah satu cara untuk menyehatkan sistem perkreditan dalam suatu bank dengan memindahkan kredit bermasalah atau kredit macet yang sulit untuk ditangani dari neraca bank menjadi *ekstrakomtable* sehingga tidak membebani kinerja bank lagi. Namun hapus buku tidak menghapus hak bank untuk menagih pelunasan kepada Debitur. Mekanisme penghapus bukuan pada dasarnya merupakan upaya terakhir yang dapat dipilih perbankan apabila upaya-upaya penyelamatan kredit yang lain seperti penagihan intensif, *reconditioning*, *rescheduling*, *restructuring* dan penjualan agunan tidak memberikan hasil yang memadai, atau debitur melarikan diri, menghilang, dan tidak bisa dihubungi lagi.

Mekanisme hapus buku pada umumnya dianggap kurang efektif bagi para pemegang saham karena dapat mengurangi laba bank dan deviden bagi pemegang saham serta mencerminkan kurang hati-hatian manajemen bank dalam mengelola portopolio kreditnya. Hapus buku merupakan mekanisme resmi yang memiliki dasar hukum, dapat dilakukan kalangan perbankan pada umumnya dalam menangani portofolio kredit bermasalahnya dimana dana yang dipergunakan untuk hapus buku tersebut sebenarnya telah disiapkan dengan pembentukan cadangan penghapusan aktiva produktif sesuai

Peraturan Bank Indonesia. Namun bagi kalangan bank BUMN dan BUMD permasalahan hapus buku masih menimbulkan keraguan hingga saat ini.

Dalam praktek, ketika terjadi kredit macet bagi kredit yang telah memiliki sertifikat penjaminan (berlaku untuk type pinjaman KUR dan Laguna) pada PT. BPD Jatim Tbk. Cabang Kediri akan diajukan Klaim kepada Pihak Penjaminan. Tidak dilakukan hapus buku (*write-off*) atas kredit karena lebih memakan waktu. Hapus buku (*write-off*) harus melalui proses yang cukup memakan waktu karena Wewenang Memutus Penghapusbukuan Piutang berada pada Direksi, atas usul/ rekomendasi Divisi Kredit. dengan syarat telah *collect 5* (macet) atau lebih dari 5 bulan. Sedangkan untuk Subrogasi tidak perlu Persetujuan dari Direksi.

Dalam proses Subrogasi, Bank akan mengajukan Klaim kepada Lembaga Penjaminan yang mengcover Fasilitas Kredit (berlaku untuk Kredit KUR maupun Kredit Laguna) tersebut dengan persyaratan, antara lain :

1. Berita Acara Klaim
2. Surat Kesanggupan Debitur
3. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)
4. Perjanjian kredit
5. Sertifikat Penjaminan
6. Analisis/pembahasan Kredit
7. Identitas Legalitas Persyaratan
8. Sistem Informasi Debitur (SID) dan Surat Keterangan Lunas
9. Mutasi Rekening Koran (*Loan Inquiri*)
10. Upaya Penyelesaian ( *Call Memo*, Surat Peringatan)

Pengajuan Klaim dilakukan oleh Bank setelah Debitur berstatus minimal *Collect 4* atau status Diragukan atau setelah lebih dari 180 hari tidak ada pembayaran dengan melengkapi syarat-syarat yang diajukan oleh Lembaga penjaminan. Berita acara Klaim berisi tentang tunggakan pokok beserta bunga debitur, Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur, agunan milik debitur yang berada di Bank, serta nomor Polis dan segala keterangan mengenai Sertifikat Pernjaminan. Selain itu pemohon klaim harus menyertakan sebab-sebab kredit tersebut macet berdasarkan hasil wawancara *on the spot*



dengan nasabah disertai dengan langkah-langkah atau usaha yang telah dilakukan oleh Bank guna menjaga kelancaran angsuran.

Surat kesanggupan debitur secara garis besar berisi tentang surat pernyataan debitur sesuai dengan poin-poin yang terkandung dalam Berita Acara Klaim. Dalam surat kesanggupan debitur juga menjelaskan bahwa terdapat subrogasi dalam proses pembayaran kredit, yaitu Apabila kewajiban kredit tersebut telah dibayar oleh Perum Jaminan Kredit Indonesia atau Lembaga penjaminan, maka hutang debitur atas sejumlah klaim ganti rugi yang dibayar berpindah dari PT. Bank Jatim Kantor Cabang Kediri kepada Perum Jaminan Kredit Indonesia dan Debitur sanggup untuk melunasinya dengan angsuran tiap-tiap jangka waktu dan angsuran yang telah disepakati. Apabila debitur tidak menepati jadwal pembayaran pada jangka waktu yang telah disepakati, maka Debitur bersedia untuk didenda atau ditempuh melalui penyelesaian prosedur hukum. Berkas Berita Acara Klaim dan Surat kesanggupan ini sebagai syarat dan tidak perlu ditandatangani oleh Debitur karena menghindari anggapan bahwa kredit dijamin/dilunasi oleh pemerintah.<sup>12</sup> [AH1]

Selain Berita Acara Klaim dan Surat Kesanggupan Debitur, syarat administrasi lain yang harus dipenuhi adalah Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), Perjanjian Kredit (PK) , Analisis/pembahasan Kredit, Identitas Legalitas Persyaratan (SIUP,TDP, NPWP), serta Sistem Informasi Debitur (SID) dan Surat Keterangan Lunas yang dilengkapi pada saat pencairan kredit. Syarat lainnya adalah Mutasi Rekening Koran (*Loan Inquiri*) dan Upaya Penyelesaian *on the spot* yang dilaporkan melalui *Call Memo* maupun Surat Peringatan. Pengajuan Klaim dilakukan Bank atau Penerima Jaminan Kepada Lembaga penjaminan paling lama 3 bulan setelah terjadi hak Klaim. Lembaga penjaminan wajib memberikan informasi kepada bank atau Penerima Jaminan paling lama 14 hari apabila terdapat kekurangan berkas guna memenuhi syarat-syarat pengajuan Klaim.

Setelah diajukan kepada Pihak Penjaminan dan memenuhi syarat administratif, maka pihak Penjaminan akan membayarkan Klaim berdasarkan analisis sesuai prosedur. Bila Klaim tersebut diterima, selanjutnya klaim akan dilimpahkan dari Pihak Penjaminan kepada Kreditur, namun hal tersebut tidak menghapus kewajiban Debitur

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan siapa?, Penyelia Supervisi (Penanganan Kredit Bermasalah) PT. BPD Jatim Cabang Kediri, 15 Juni 2015.

untuk tetap mengangsur sisa pinjamannya kepada Kreditur. Debitur tetap harus membayar kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit (PK) awal yang telah disepakati antara Debitur dengan Kreditur. Bila klaim tersebut ditolak, maka tidak akan ada pembayaran dari pihak Penjaminan. Sebab Klaim ditolak oleh Lembaga Penjaminan antara lain<sup>13</sup> :

1. Tanggal realisasi pinjaman lebih cepat daripada tanggal pelunasan fasilitas KUR yang dimiliki sebelumnya. Karena seorang debitur tidak diperbolehkan mendapat 2 fasilitas KUR dalam waktu bersamaan<sup>14</sup>.
2. Aset atau agunan yang dijaminkan tidak sesuai dengan ketentuan
3. Diketahui bahwa debitur dianggap mampu dan tidak berhak mendapatkan fasilitas KUR.

Ketika terjadi pembayaran pertama oleh Debitur sejak Klaim dibayarkan oleh Lembaga Penjaminan, maka saat itu terjadi Subrogasi. Dimana Subrogasi atas pembayaran oleh Debitur tidak mempengaruhi neraca namun hanya mempengaruhi laba perusahaan. Pembayaran yang dilakukan oleh Debitur akan dibayarkan atau dikembalikan kepada Pihak penjaminan melalui Bank. Proses ini yang dimaksud dengan subrogasi.

Akibat Subrogasi atas kewajiban Debitur mengangsur adalah Debitur tetap wajib mengembalikan sisa pinjaman yang telah disetujui dalam Perjanjian Kredit. Pasal 1403 KUHPdata menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam hal utang debitur hanya dibayar sebagian oleh pihak ketiga, maka subrogasi baik yang terjadi karena perjanjian maupun yang terjadi karena Undang-undang, tidak menghalangi kreditur lama untuk menuntut sisa pembayaran utang dari debitur.

Perusahaan asuransi tidak dapat melakukan subrogasi jika perikatan dasar antara tertanggung dan pelaku perbuatan melawan hukum tidak pernah ada meskipun penanggung telah membayar klaim asuransi kepada tertanggung.

Faktor lain yang menghalangi subrogasi adalah jika pihak penanggung yang karena kesalahannya melakukan pembayaran kepada bukan tertanggung. Hal itu mengakibatkan penanggung tidak dapat melakukan subrogasi. Namun demikian, perusahaan asuransi sebagai penanggung dapat meminta pengembalian uang berdasarkan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang **Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)**.

Pasal 1359 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa setiap pembayaran memperkirakan adanya utang dan pembayaran tidak wajib dapat diminta kembali. Sedangkan bagi pihak tertanggung yang dirugikan karena kekhilafan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara<sup>15</sup>

Penagihan piutang setelah pembayaran klaim dijelaskan dalam perjanjian tersendiri yang dituangkan dalam MOU antara Pihak PT. BPD Jatim, Tbk dengan Lembaga Penjaminan. Isi dari MOU antara Pihak Bank dengan Lembaga Penjaminan antara lain adalah Penerima Penjaminan wajib menagih piutang subrogasi secara aktif sesuai dengan jumlah kerugian atau sisa angsuran sampai dengan lunas. Apabila penjamin dan/atau Penerima Jaminan berhasil melakukan penagihan maka penjamin dan/atau Penerima Jaminan harus memberitahukan secara tertulis antara satu dengan lainnya. apabila upaya penagihan piutang Subrogasi telah dilakukan secara optimal namun belum mendapatkan hasil yang maksimal, maka Penjamin dan/atau Penerima Jaminan atau Bank dapat melakukan penjualan agunan kredit, baik secara dibawah tangan maupun melalui jalan lelang agunan kredit melalui Balai Lelang atau pelelangan dimuka umum. setiap penerimaan pembayaran atau hasil penagihan dari Debitur akan dibagi haknya secara proporsional antara Penjamin dengan Penerima Jaminan atau Bank setelah dikurangi biaya yang telah disepakati para pihak.

Apabila terjadi penjualan agunan kredit, maka hasil penjualan agunan kredit tersebut dibagi secara proporsional antara Penjamin dengan Penerima Jaminan atau Bank setelah dikurangi biaya yang telah disepakati para pihak termasuk biaya asuransi tertunggak dan biaya Notaris. Sanksi bagi para pihak yang melakukan wanprestasi dalam subrogasi tidak diatur dalam KUHPerdara.

## Simpulan

1. Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Laguna Karena Wanprestasi Melalui Subrogasi pada PT. BPD Jatim Tbk. Cabang Kediri

---

<sup>15</sup> Suharnoko dan Endah Hartati, **Doktrin Subrogasi, novasi dan Cessie**, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2006, hlm. 24.

terdapat dimana hukum memberikan perlindungan bagi Bank sebagai kreditur yang dapat dirugikan akibat wanprestasi oleh debitur dengan cara memberikan kekuasaan secara terukur sesuai dengan peraturan perundangan yang jelas. Hal itu dilakukan untuk mengatur secara tegas guna melindungi bank sebagai pemberi fasilitas pinjaman yaitu berdasarkan KEP.01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang SOP Pelaksanaan KUR dan SOP yang berlaku pada Bank pelaksana. Kekuasaan tersebut adalah dengan menentukan isi MOU yang akan berlaku sebagai Undang-undang bagi Bank dan Lembaga penjaminan. Dalam *Memorandum Of Understanding* atau MOU antara PT. BPD Jatim Tbk. Cabang Kediri dengan PT.Jamkrida dan PT.Jamkrindo menjelaskan bahwa Kreditur memiliki Hak Klaim dan upaya Penyelamatan Kredit sebagai Perlindungan Hukum bagi Bank Dalam Penyelesaian kredit Melalui Subrogasi.

2. Sistem subrogasi yang dilakukan oleh PT. BPD Jatim Tbk. Cabang Kediri dan lembaga penjaminan yang telah ditunjuk sesuai dengan KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara kedua belah pihak. Subrogasi dimulai ketika terjadi wanprestasi dari Debitur penerima fasilitas Kredit yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan. Dalam proses Subrogasi, Bank akan mengajukan Klaim kepada Lembaga Penjaminan yang mengcover Fasilitas Kredit (berlaku untuk Kredit KUR maupun Kredit Laguna) tersebut dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama antara Pihak Terjamin dan Lembaga Penjaminan. Ketika terjadi pembayaran pertama oleh Debitur sejak Klaim dibayarkan oleh Lembaga Penjaminan, maka saat itu terjadi Subrogasi. Pembayaran yang dilakukan oleh Debitur akan dibayarkan atau dikembalikan kepada Pihak penjaminan melalui Bank. Proses ini yang dimaksud dengan subrogasi. Akibat Subrogasi atas kewajiban Debitur mengangsur adalah Debitur tetap wajib mengembalikan sisa pinjaman yang telah disetujui dalam Perjanjian Kredit. Hak subrogasi dapat hilang dikarenakan syarat-syarat yang telah disepakati tidak dapat terpenuhi seluruhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Subekti, 1985, **Hukum Perjanjian Internasional**, Intermasa, Jakarta.

Munir Fuady, **Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mariam Darus Badruzaman, 2001, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Suharnoko dan Endah Hartati, 2006, **Doktrin Subrogasi, novasi dan Cessie**, Kencana Prenada Group, Jakarta.

Kasmir, 2012, **Manajemen Perbankan**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang **Perbankan**.

Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP.01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang **Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat**.